

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG**

**NOMOR 207 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA  
PERALATAN DAN MESIN DAN ASET TAK BERWUJUD  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tak Berwujud pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan

sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, perlu ditetapkan status penggunaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tak Berwujud pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN DAN ASET TAK BERWUJUD PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa 11 (sebelas) unit Peralatan dan Mesin dan 4 (empat) unit Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU seluruhnya sebesar Rp331.362.010,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu sepuluh rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi atas Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Desember 2021

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

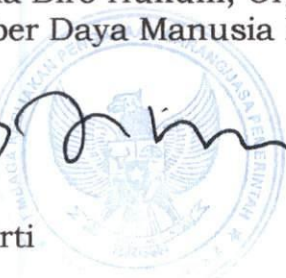
Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Barang; dan
3. Inspektorat LKPP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN DAN ASET TAK BERWUJUD PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 207 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 DESEMBER 2021

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN UNTUK PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Tipe	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	4	3	5	6	7	8
<b>A. PERALATAN DAN MESIN</b>							
1	3050105010	White Board	44	Glassboard (60x120)	27 September 2021	1	Rp 1.430.000
2	3050105010	White Board	45	Glassboard (60x120)	27 September 2021	1	Rp 1.430.000
3	3050105010	White Board	46	Glassboard (60x120)	27 September 2021	1	Rp 1.430.000
4	3050105010	White Board	47	Glassboard (60x120)	27 September 2021	1	Rp 1.430.000
5	3050105010	White Board	48	White Board (100x120 cm)	27 September 2021	1	Rp 2.420.000
6	3060102132	Video Conference	7	ID Paket PKM-Offline-00300	14 September 2021	1	Rp 28.850.800
7	3100102004	Palm Top	53	Microsoft Surface Go 2	22 Februari 2021	1	Rp 14.800.500
8	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komput	105	Fujitsu SP1125N	03 Juli 2021	1	Rp 6.600.000
9	3100203007	External	337	WD New My Passport 2 TB	03 Maret 2021	1	Rp 1.053.570
10	3100203007	External	338	WD New My Passport 2 TB	03 Maret 2021	1	Rp 1.053.570
11	3100203007	External	339	WD New My Passport 2 TB	03 Maret 2021	1	Rp 1.053.570
<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN PERALATAN DAN MESIN</b>						<b>11</b>	<b>Rp 61.552.010</b>

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Tipe	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
<b>B. ASET TAK BERWUJUD</b>							
1	8010101001	Software Komputer	543	E-Konsolidasi	30 Desember 2020	1	Rp 37.350.000
2	8010101001	Software Komputer	545	Virtual Library	28 Januari 2021	1	Rp 72.500.000
3	8010101001	Software Komputer	546	SiRenaksi	03 Juni 2021	1	Rp 69.960.000
4	8010101001	Software Komputer	548	SiPerpindahan	05 Agustus 2021	1	Rp 90.000.000
<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASET TAK BERWUJUD</b>						<b>4</b>	<b>Rp 269.810.000</b>
<b>TOTAL NILAI PEROLEHAN</b>						<b>15</b>	<b>Rp 331.362.010</b>

Pt. KEPALA LEBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,

ttd

SARAH SADIQA